



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 6 Tahun 2025 Page 100-119

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Resistensi Sipil Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Hashtag Media Sosial Twitter #percumalaporpholisi

Dinda Rosanti Salsa Bela

Universitas Jambi

Email : [dindasalsabela@unja.ac.id](mailto:dindasalsabela@unja.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat resistensi sipil yang dilakukan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan hashtag #percumalaporpholisi melalui media sosial Twitter. Fokus penelitian ini adalah penyampaian informasi melalui media sosial twitter terkait resistensi sipil (civil disobedience) yang dilakukan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diteliti mulai dari tanggal 8 oktober 2021 hingga 22 oktober 2021. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan substansi: resistensi sipil yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. pendekatan yang digunakan adalah Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) dengan memanfaatkan perangkat lunak Nvivo 12 Plus sebagai instrumen analisis. Sumber data penelitian bersumber dari unggahan Twitter yang menggunakan tagar #percumalaporpholisi sebagai objek utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sentimen negatif masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia menguat. Sentimen negatif ini dapat diartikan sebagai bentuk resistensi sipil yang tidak dapat dibendung oleh masyarakat dengan jumlah 86%. Tagar #percumalaporpholisi dilengkapi dengan berbagai cerita warga yang dikecewakan oleh polisi. Melalui analisis kata yang paling sering muncul peneliti mengambil 20 kata dari #percumalaporpholisi. Konten tersebut berisi bentuk kritikan masyarakat yang sering membuat masyarakat geram terhadap kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Kata Kunci : *Civil Disobedience*; *#Percumalaporpholisi*; *POLRI*.

## Abstract

This study aims to examine civil disobedience carried out by the public against the Indonesian National Police (POLRI) based on the hashtag #percumalaporpolisi via Twitter. The focus of this study is the dissemination of information via Twitter regarding civil disobedience carried out by the public against the Indonesian National Police (POLRI) which was studied from October 8, 2021, to October 22, 2021. This study seeks to answer the substantive question: civil disobedience carried out by the public against the performance of the Indonesian National Police. The approach used is Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) using Nvivo 12 Plus software as an analytical instrument. The research data source comes from Twitter posts using the hashtag #percumalaporpolisi as the main object. The results of the study indicate that negative public sentiment towards the Indonesian National Police is strengthening. This negative sentiment can be interpreted as a form of civil disobedience that cannot be contained by the public with a total of 86%. The hashtag #percumalaporpolisi is accompanied by various stories of citizens disappointed by the police. Through analysis of the most frequently occurring words, researchers extracted 20 words from #percumalaporpolisi. This content contains public criticism that often infuriates people regarding cases not yet resolved by the Indonesian National Police (POLRI).

*Keywords: Civil Disobedience; #Percumalaporpolisi; POLRI.*

## PENDAHULUAN

Konsep mengenai masyarakat sipil memiliki cakupan yang sangat luas. Istilah ini, yang juga dikenal sebagai warga madani, merujuk pada ruang interaksi sosial yang mencakup berbagai kelompok sosial paling mendasar seperti keluarga, organisasi atau asosiasi yang bersifat sukarela, gerakan sosial, serta beragam sarana komunikasi publik yang terbentuk melalui mekanisme pengaturan dan mobilisasi mandiri. Baik institusi maupun aktivitas di dalamnya berdiri secara otonom (Hundman & Parkinson, 2019). Perspektif lain dikemukakan oleh Gramsci juga mendefinisikan masyarakat sipil sebagai gugusan organisme "swasta", tidak sama menggunakan negara yang disebutnya politik publik (Fitz-Henry, 2018). Secara konkrit, Gramsci menekankan masyarakat sipil menjadi domain institusi partikelir, termasuk gereja, perkumpulan pekerja/serikat buruh, dan institusi pendidikan, sedangkan negara terdiri dari institusi publik mirip pemerintah, pengadilan, polisi, serta tentara (Efendi & Haryadi, 2016). Gramsci terkadang mendefinisikan negara menjadi masyarakat politik plus rakyat sipil Negara harus dipahami tidak hanya sebagai aparatur pemerintah, tetapi juga menjadi aparatur warga sipil partikelir. Gramsci juga mendefinisikan negara menjadi warga politik plus masyarakat sipil, negara wajib dipahami tidak hanya menjadi aparatur pemerintah, tetapi juga menjadi aparatur swasta masyarakat sipil (Vandepitte et al., 2019).

Perlawanan sipil merupakan sarana bagi masyarakat biasa untuk menuntut hak,

kebebasan, serta keadilan tanpa menggunakan cara-cara yang bersifat kekerasan. Individu yang terlibat dalam bentuk perlawanan ini memanfaatkan beragam strategi mulai dari aksi mogok, boikot, demonstrasi dalam skala besar, hingga bentuk-bentuk tindakan publik lainnya guna mendorong terjadinya perubahan di bidang sosial, politik, maupun ekonomi (Hanna et al., 2016). Di berbagai konteks, istilah perlawanan sipil sering digantikan dengan sebutan lain seperti aksi tanpa kekerasan, tindakan langsung, kekuatan rakyat, perbedaan pandangan politik, atau mobilisasi komunitas. Meskipun nama yang digunakan berbeda-beda, dorongan utama yang melatarbelakangi perlawanan masyarakat tetap menunjukkan pola yang sama, yakni keinginan untuk menyuarkan ketidakadilan dan menuntut transformasi sosial (Bereményi & Muriel, 2019).

Gerakan perlawanan yang muncul dari masyarakat memperoleh kekuatannya karena mampu mengajak partisipasi luas dalam menentang penindasan, sekaligus menawarkan gambaran baru mengenai kehidupan warga yang lebih merdeka, lebih setara, dan tidak jarang juga memunculkan sikap loyal terhadap tatanan lama yang ingin mereka pertahankan (Schradié, 2018). Ketika sekelompok orang memutuskan untuk menghentikan keterlibatan mereka dengan penguasa yang berlaku tidak adil, biaya untuk mempertahankan sistem tersebut menjadi jauh lebih tinggi. Jika jumlah masyarakat yang memilih tidak bekerja sama semakin banyak, maka struktur kekuasaan dapat lumpuh dan pada akhirnya terpaksa mengalami perubahan atau bahkan digulingkan (Vandevoordt, 2019). Bahkan dalam kondisi ketika pihak yang menjadi lawan gerakan non-kekerasan memiliki senjata serta dukungan finansial yang kuat, mereka kerap kali tidak mampu menahan tekanan dari resistensi publik yang berlangsung secara massal dan terus-menerus. Situasi tersebut muncul sebagai konsekuensi dari strategi dan tindakan perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan secara meluas (Celikates, 2019). Selama satu abad terakhir, di enam benua, gerakan-gerakan besar yang mengadopsi metode non-kekerasan berhasil menumbangkan rezim otoriter, melawan pendudukan dan dominasi militer, serta membuka jalan bagi terciptanya ruang kebebasan dan keadilan yang lebih besar bagi masyarakatnya (Román, 2021). Salah satu contoh yang paling dikenal adalah kontribusi perlawanan sipil dalam mengakhiri kebijakan apartheid di Afrika Selatan. Strategi non-kekerasan juga memainkan peran penting dalam mempercepat perjuangan hak-hak perempuan, hak-hak sipil, dan hak-hak buruh di Amerika Serikat, menahan upaya pendudukan asing di Denmark dan Timor Leste, serta diterapkan secara luas di berbagai negara untuk menegakkan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan, dan membangun sistem pemerintahan yang demokratis (Lutskyi et al., 2019).

Istilah resistensi sipil pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Amerika bernama Henry David Thoreau pada tahun 1849 (Franco, 2019). dia memahami kenyataan ini menjadi korelasi politik antara subyek sipil atau warga negara serta pemerintah (Durstun et al., 2016). Thoreau mengatakan bahwa rakyat intinya mempunyai hak buat menolak memberikan kesetiaan kepada penguasa, terutama saat tirani atau inefisiensi mereka tumbuh serta menjadi tak tertahankan (Lundberg, 2021). Thoreau menekankan bahwa individu tak boleh membiarkan pemerintah mengesampingkan atau menghilangkan hati nurani mereka (Bakratcheva, 2019). Oleh sebab itu, mereka mempunyai kewajiban buat menghindari memberikan persetujuan tadi, membiarkan pemerintah membuahkannya mereka agen ketidakadilan (Hess & Satcher, 2019). Tetapi, definisi resistensi sipil yang paling diterima secara luas dikemukakan sang John Rawls dalam Theory of Justice klasiknya: dari Rawls (Jubb, 2019). Resistensi sipil, tidak mirip bentuk perlawanan lainnya, ialah "tanpa kekerasan, hati-hati, namun politik publik. tindakan melawan aturan." umumnya dilakukan menggunakan tujuan mengakibatkan perubahan aturan atau pemerintahan "dengan mengacu pada "rasa keadilan dominan", semuanya "pada hal kepatuhan terhadap hukum", yang diantaranya dinyatakan dalam menerima kemungkinan hukuman (Adams, 2018).

Resistensi sipil artinya protes yang dibenarkan secara moral yang tidak bisa berdasarkan hanya di keyakinan langsung atau kepentingan pribadi individu. Ini adalah tindakan publik, sebagai suatu peraturan, diumumkan sebelumnya dan yang dapat dikendalikan sang polisi waktu itu terjadi (Hashizume, 2017). Itu termasuk pelanggaran istiadat hukum yang direncanakan tanpa mempersoalkan kepatuhan terhadap aturan hukum secara holistik, menuntut kesiapan buat mendapatkan konsekuensi hukum asal pelanggaran adat-tata cara tadi (Lawson, 2017). Oleh sebab itu, restriksi dikenakan di wahana protes tanpa kekerasan (Delmas, 2018). Kampanye perlawanan sipil yang berhasil dimulai menggunakan membentuk kapasitas orang-orang biasa buat merogoh tindakan (Adorjan et al., 2021). taktik lokal berisiko rendah buat mengorganisir komunitas dan membentuk persatuan mampu menjadi sangat penting (Terzis, 2016). Contohnya, sebelum Gandhi meluncurkan kampanye perlawanan sipil besar pertamanya pada India, beliau menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mengunjungi dan berbicara dengan orang biasa, menelaah keluhan, harapan, serta ketakutan mereka (Franco, 2019). Dia membangun pencerahan yang diperlukan buat memenangkan loyalitas serta kerjasama mereka. dia juga mendorong rakyat buat berpartisipasi dalam "karya konstruktif" (Niesen, 2019).

Pengabdian kepada masyarakat membangun kemandirian bagi rakyat yang sudah kehilangan agama terhadap negaranya namun sebelumnya merasa tak memiliki kekuatan buat bertindak (Yamin, 2019). Begitu kampanye menciptakan kapasitas yang relatif buat terlibat secara langsung dalam banyak perlawanan sipil, kampanye seringkali kali dimulai dengan aksi langsung di tingkat lokal, yang beresonansi menggunakan masyarakat luas (Jubb, 2019). Misalnya, pejabat Solidaritas di Polandia, dimulai dengan seorang pekerja 'menyerang galangan kapal. ketika berbicara tentang memenangkan sebuah informasi serta membentuk serikat pekerja independen, kemenangan memiliki dampak psikologis yang akbar pada orang Polandia pada semua negeri, dan gerakan itu menerima kekuatan (Penders & Shaw, 2020). Demikian jua pada Amerika Serikat, gerakan hak-hak sipil mengambil momentum sesudah keberhasilan protes membisu serta boikot buat mengakhiri segregasi rasial pada toko-toko serta bus di beberapa kota di Amerika perkumpulan bagian selatan. Menggunakan keberhasilan ini, gerakan tersebut membagikan kekuatan perlawanan sipil, serta dengan cepat mendapat perhatian nasional dan diikuti oleh gerakan-gerakan lainnya (Delmas, 2018).

Penelitian ini akan menggali konten seperti apa yang sedang diperbincangkan warga terkait penguatan #percumalaporpolisi yang banyak dibicarakan rakyat. aktivitas ini merupakan bentuk resistensi sipil yang dilakukan oleh masyarakat melalui media umum. Penelitian ini akan fokus di dialog yang terjadi di platform media sosial Twitter. Hal yang mendasari pemilihan Twitter adalah basis pengguna Twitter yang sangat akbar serta aktif di Indonesia. Indonesia, bersama dengan Amerika perkumpulan, Brasil, Inggris, dan Jepang, adalah negara menggunakan basis pengguna Twitter terbesar di dunia (Iwuoha & Aniche, 2021). Menggunakan basis pengguna yang sangat besar, Twitter Indonesia relatif reaktif terhadap berbagai macam info yang beredar di Internet. Hal ini membentuk opini publik yang diunggah ke Twitter atau yang lebih dikenal menggunakan tweet dan hastag, memiliki akurasi yang relatif tinggi Jika dipergunakan buat memantau atau mengetahui opini publik terhadap hal-hal eksklusif, termasuk opini publik atas poly masalah yang belum terselesaikan oleh kepolisian. Republik Indonesia (POLRI) sebagai akibatnya muncul hashtag #percumalaporpolisi.

Media umum sudah menjadi bagian berasal rakyat pada masa ini saat ini. media umum sudah dipergunakan pada aneka macam bidang kehidupan, mulai dari ekonomi serta bisnis, pendidikan, budaya, agama, politik, dan lain sebagainya (Newman, 2019). Penggunaan media sosial secara masif memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola pikir dan gaya hidup

warga , serta pola hubungan mereka satu sama lain (Martinez & Garcia, 2018). Masyarakat sekarang disuguhkan dengan opsi yang cenderung praktis dan mudah untuk dapat berhubungan antara satu sama lainnya, masyarakat dapat bertukar informasi dan menyampaikan berbagai hal didalamnya melalui sosial media (Prior & Crofts, 2016). Media umum telah sebagai ruang buat menghasilkan ide serta gagasan, perdebatan, bahkan opini publik. Hal ini menarik perhatian banyak orang, mulai asal pebisnis, akademisi, sampai politisi serta pembuat kebijakan, buat memanfaatkan wawasan yang didapat menggunakan mengamati media sosial buat berbagai keperluan (Fronek & Chester, 2016). Di Indonesia, resistensi sipil yang menjadi trending topic akhir-akhir ini adalah bentuk perlawanan warga terhadap hukum yang berlaku (Fitz-Henry, 2018). Bentuk ketidaktaatan ini ada dan menguat saat masyarakat kehilangan kesabaran terhadap masalah-perkara yang ditangani polisi, khususnya kasus pidana (Hundman & Parkinson, 2019). Ketidaktaatan ini diungkapkan masyarakat melalui media umum dengan tagar #percumalaporpolisi. munculnya #percumalaporpolisi merupakan bentuk kritik warga atas ketidakpercayaan warga terhadap kinerja kepolisian. Menanggapi kritik masyarakat melalui #percumalaporpolice harus ditanggapi dengan serius. Hal ini harus menjadi pembenahan bagi kepolisian karena sejalan menggunakan visi misi kepolisian yaitu presisi.

Hashtag ini sebenarnya bukan sekedar hashtag, tetapi berbicara wacana batalnya yang akan terjadi upaya publik buat mendapatkan keadilan. Perilaku informasi adalah kegiatan di mana seseorang dapat terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan informasinya sendiri, mencari informasi tersebut dalam berbagai cara, dan menggunakan atau mentransfer informasi tersebut (Nurrahmi & Syam, 2020). Polisi lalu wajib hadir pada rakyat, menuntaskan masalah-masalah pada rakyat, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana. sesuai amanat negara, polisi diamanatkan untuk memberikan pelayanan serta perlindungan kepada siapapun yang mencari keadilan (Efendi & Haryadi, 2016).

Berangkat dari Kritik, rakyat tak ingin budaya viral ditindak lanjuti terlebih dahulu. tetapi polisi mampu proaktif, bisa profesional, mampu bertanggung jawab merampungkan perkara yang dikeluhkan masyarakat dan mampu menangani kasus secara mendalam. Ketika perhatian publik tertuju pada #percumalaporpolisi, polisi tidak boleh resisten atau antikritik. Melalui hashtag ini, diharapkan menjadi momentum bagi kepolisian buat memperbaiki dan mengevaluasi institusinya secara utuh dan komprehensif. kontras menilai tagar tadi artinya bentuk kritik publik terhadap kinerja Korps Bhayangkara yang wajib ditanggapi secara berfokus dan mendalam. karena program ini menerima perhatian spesifik

berasal rakyat, program ini wajib menjadi batu loncatan buat perbaikan yang signifikan pada kepolisian (Adams, 2018). Pada akhirnya penelitian ini dibuat oleh penulis yang berupaya menjawab pertanyaan tentang substansi bagaimana resistensi sipil (civil disobedience) yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Perangkat lunak analisis penelitian ini menggunakan Nvivo 12 plus. Nvivo 12 plus sebagai alat analisis kualitatif menampilkan data dalam bentuk kuantitatif yang disebut dengan analisis kualitatif ke kuantitatif (Rosanti et al., 2021). Pendekatan kualitatif memberikan eksplorasi dan deskripsi mengenai resistensi sipil yang dilakukan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan deskriptif untuk memberikan informasi, dan penjelasan data secara efisien (Lawson, 2017). Data penelitian ini adalah konten Twitter yaitu #percumalaporpolisi. Penelitian ini menggunakan perangkat analisis Nvivo 12 plus untuk menganalisis grafik, analisis cluster, dan analisis cloud word. Penggunaan Nvivo sebagai alat analisis memiliki lima tahapan: (1) menangkap data, (2) mengimpor data, (3) pengkodean data, (4) klasifikasi data, dan (5) menampilkan data (Rosanti et al., n.d.). Data yang telah ditampilkan diserahkan kepada data dengan metode analisis data kualitatif.

Penelitian ini menggunakan Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) Nvivo 12 plus untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dengan analisis grafik, analisis cluster, dan analisis cloud word (Suswanta, Danang Kurniawan, Achmad Nurmandi, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat resistensi sipil (civil disobedience) yang dilakukan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan hashtag #percumalaporpolisi melalui media sosial Twitter. Fokus penelitian ini adalah penyampaian informasi melalui media sosial dalam menyampaikan resistensi sipil (civil disobedience) yang dilakukan Masyarakat Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui hashtag #percumalaporpolisi yang diteliti mulai dari tanggal 8 oktober 2021 hingga 22 oktober 2021.

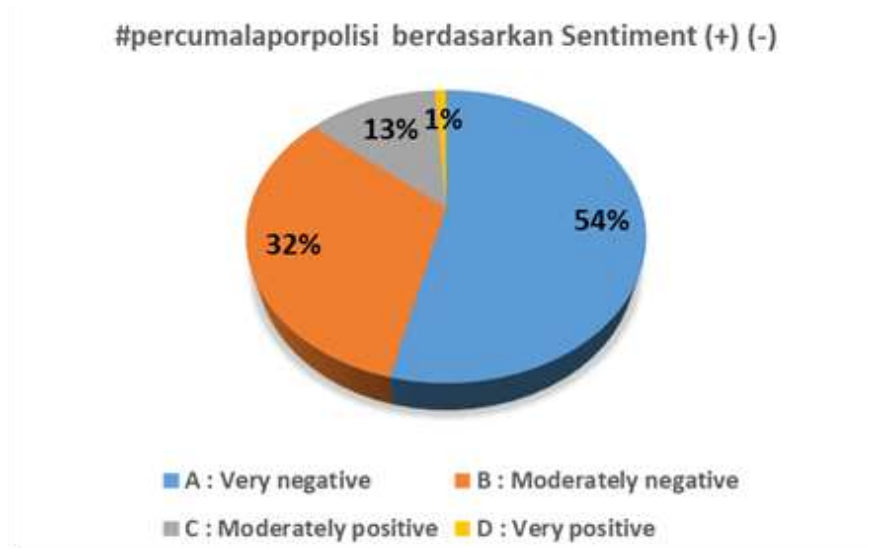
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sentiment Sosial Media Twitter Berdasarkan Hashtag #percumalaporpolisi

Media sosial sangat penting sebagai komunikasi tentang setiap insiden, termasuk bentuk penolakan masyarakat (Iwuoha & Aniche, 2021). Studi ini menganalisis status quo saat ini menggunakan mengusut rangkaian waktu, jaringan, dan konten (Rimmer, 2017).

Kemunculan media umum sudah mampu mengubah pola hubungan serta kebiasaan rakyat (Rosanti et al., 2021). Jumlah pengguna media sosial sekarang berkembang pesat seiring menggunakan kemajuan teknologi berita yang berkiprah cepat. Pengguna internet sekarang bebas menyebarkan informasi hingga membuat opini publik yang mempunyai berbagai arti. Opini ini diyakini sebagai data yang akurat sebab opini publik terbentuk asal luapan emosi, opini yang ada, atau cerita yang viral di media umum. Seperti halnya di Twitter yang digunakan untuk memperbarui tweet, membalas tweet, dan menyebut seorang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi pengguna internet (Penders & Shaw, 2020). Peringatan, yang tiba berasal pemangku kepentingan yang telah mapan, merupakan pesan yang paling awam, menjadikannya krusial buat komunikasi risiko (Terzis, 2016). karena kurangnya isu ihwal tindakan perlindungan serta rekomendasi buat sikap media umum, diperlukan informasi yang lebih berguna buat disebarluaskan (Efendi & Haryadi, 2016). Kemajuan teknologi memungkinkan warga sipil untuk menyebarluaskan tuntutan dan hak-hak mereka.

Sentimen media sosial adalah bentuk implementasi perasaan positif atau negatif yang digambarkan pada posting atau keterlibatan di media sosial. Sentimen itu juga merupakan segala bentuk terapan media umum tidak selalu berdampak positif. waktu ini, resistensi sipil seringkali terjadi pada media sosial (Schradi, 2018). Satu hal krusial yang digariskan merupakan kebangkitan warga sipil selalu terkait menggunakan ketidakadilan rezim dalam menjalankan pemerintahannya (Fronek & Chester, 2016). Kegagalan pemerintah pada menerapkan penegakan hukum yang amanah dan adil sebagai momentum kebangkitan masyarakat sipil buat menyuarakan hak-haknya (Hanna et al., 2016). Situasi ini mudah dipahami menggunakan tahu tindakan represif pemerintah pada menanggapi tuntutan rakyat (Neumayer & Svensson, 2016). Semakin maraknya penggunaan jejaring sosial mirip Twitter membuat jejaring sosial tersebut sebagai sangat akbar. galat satu kegunaan data ini merupakan buat mengetahui opini atau sentimen pengguna jejaring sosial terhadap suatu topik.



Gambar 1. Sentiment #percumalaporpolisi

Topik yang menjadi sorotan akhir-akhir ini artinya tagar viral #percumalaporpolisi. Melalui media sosial Twitter, ribuan orang memadati POLRI buat mengatakan kekecewaannya terhadap Korps Bhayangkara. warga tidak berdemonstrasi secara eksklusif pada Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lokasi Mabes Polri, melainkan melakukan demonstrasi melalui media sosial Twitter. Mereka memadati platform serta meneriakkan tagar #percumalaporpolisi. munculnya sinisme terhadap Korps Bhayangkara ada karena perkara pelecehan seksual 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang penyidikannya dihentikan polisi. banyak orang mencurigai kerja polisi. Korps Bhayangkara dinilai masih jauh dari slogannya menjadi lembaga yang mengayomi warga .

Dalam sekejap, tagar #percumalaporpolisi pun tercipta. Melalui ini, masyarakat mempunyai kesempatan buat bersuara. Oleh karena itu, orang menyebarkan pengalaman tidak menyenangkan mereka menggunakan polisi. Beberapa asal mereka bahkan tidak mau melapor ke polisi saat menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan jalanan. Sentimen negatif terhadap polisi bukan kali ini saja terjadi. Karya mereka yang mampu dikatakan jauh berasal profesional, semakin memperkuat sentimen negatif publik. banyak perkara kekerasan terhadap rakyat sipil, penangkapan dan kasus lain yang harus ditangani. Hal ini membentuk rakyat tidak heran Jika kasus dugaan pelecehan seksual menjadi tren sebab keraguan dilempar ke pihak kepolisian. berdasarkan masalah tersebut, akhirnya menjadi pemicu bagi rakyat buat melampiaskan emosinya, yang diteriakkan melalui #percumalaporpolisi.

Sesuai data yang ditampilkan, terlihat sentimen negatif warga terhadap POLRI semakin kuat. Sentimen negatif ini bisa diartikan menjadi bentuk resistensi sipil yang tidak

dapat dibendung oleh warga. Sentimen sangat negatif mendominasi tagar #percumalaporpolisi menggunakan persentase 54%. Sentimen cukup negatif sendiri sebanyak 32%, menggunakan jumlah sentimen ke arah negatif sebesar 86%. Hanya 14% berasal hashtag #percumalaporpolisi yang menyatakan bahwa publik tidak keberatan dengan hashtag tersebut. Bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap POLRI ini di akhirnya berupa perilaku resistensi terhadap penegakan aturan di Indonesia.

Tagar #percumalaporpolisi bukan sekedar perbincangan pada warung kopi, melainkan evaluasi publik dari pihak kepolisian buat melakukan pembenahan terhadap sistem yang telah mengakar pada sana. yang perlu ditingkatkan artinya penegakan aturan di bidang penyidikan. pada beberapa tahun terakhir, ada norma baru saat proses penyelidikan serta penyidikan ditutup. Ini menyisakan ruang buat penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang saat ini berpotensi terjadi. pada proses penyidikan serta penyidikan, hampir tidak terdapat ruang terbuka bagi publik, baik pelapor juga terlapor yang mengajukan keberatan. Setidaknya terdapat 12 masalah yang tidak boleh polisi semenjak Juni 2020 sampai Oktober 2021. kasus yang tidak boleh itu beredar pada taraf Polsek, Polres dan Polda dengan laporan masalah contohnya sangat beragam. seperti kekerasan, gratifikasi, penyerangan, penyerangan seksual, serta penembakan oleh petugas. Alasan banyak sekali kasus tidak ditindaklanjuti. contohnya, tidak adanya saksi, kurangnya bukti, arahan buat diselesaikan secara internal, damai, dan sebagainya. terdapat kendala pada mengungkap ciri-ciri pelaku dan beberapa alasan lain atas perkara tadi.

Tagar tersebut juga ialah bentuk spontanitas masyarakat dalam berkomunikasi melalui kritik serta kontrol sosial terhadap polisi. Jadi begitulah seharusnya pelayanan publik yang terbaik, yang lalu harus dilakukan polisi. Selain itu, tagar yang sama jua mampu diartikan menjadi bentuk tuntutan masyarakat atas janji polisi menjalankan motto Rastra Sewakottama. ad interim itu, Rastra Sewakottama ialah galat satu lambang POLRI, yang ialah POLRI merupakan Pengabdian utama Nusa serta Bangsa. pentingnya reformasi kepolisian menyusul penyebaran tagar #PercumaLaporPolisi. Bila perbaikan tak segera dilakukan, warga akan tak percaya pada polisi. Bila hal ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan semakin poly ketidakpercayaan terhadap polisi.

Tagar #PercumaLaporPolisi berlanjut pada hari-hari berikutnya seiring dengan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat ketika berhadapan menggunakan polisi. kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan ini antara lain seorang pedagang pasar yang sebagai tersangka sehabis ditikam sang seseorang preman dan seseorang lelaki tua yang ditangkap

karena menebas seorang pencuri yang mencoba menyetrumnya. Hal ini terkait menggunakan kekecewaan rakyat terhadap institusi kepolisian yang dinilai tidak transparan dan akuntabel pada menangani kasus yang dilaporkan masyarakat. tidak hanya berawal berasal satu perkara, tagar ini terus menjadi sorotan seiring maraknya perkara kekerasan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa belakangan ini. Alhasil, tagar #PercumaLaporPolisi menjadi trending beberapa hari terakhir.

Konten Analisis Sosial Media Twitter berdasarkan Hashtag #percumalaporpolisi

Wawasan akurat dari media sosial seperti Twitter, dapat diperoleh jika pengguna melihat tweet yang muncul di Twitter setiap hari. Karena banyaknya tweet dan pertumbuhan yang cepat, tidak mungkin melakukan ini secara manual tanpa bantuan alat berbasis komputer. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang ditangkap melalui Ncapture sehingga menghasilkan data yang berisi berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan #percumalaporpolisi. Fitur Ncapture digunakan oleh peneliti karena memungkinkan peneliti untuk secara bersamaan memperoleh tweet yang diunggah oleh pengguna Twitter, sehingga dalam penelitian ini tweet dikumpulkan dengan memanfaatkan fasilitas ini. Analisis teks tweet pertama adalah analisis frekuensi kemunculan kata.



Gambar 2. Visualisasi wordcloud untuk kata-kata yang sering digunakan #percumalaporpolisi

Berdasarkan Gambar dua terlihat bahwa konten kata yang paling sering ada dari hashtag #percumalaporpolisi adalah hashtag #percumalaporpolisi itu sendiri. Tagar tadi seringkali disertai dengan cerita masyarakat yang dikecewakan sang polisi. Melalui analisis istilah yang paling seringkali ada, peneliti merogoh 20 kata yang paling tak jarang digunakan pada #percumalaporpolisi. Konten tersebut berisi bentuk kritik masyarakat yang kerap

menghasilkan rakyat murka atas perkara yang belum selesai sang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kritikan POLRI harus dijadikan bentuk perhatian serta masukan buat introspeksi atau perbaikan diri. Aparat kepolisian harus profesional, menjaga sopan santun, dan tidak memberikan sikap sombong. semua anggota POLRI wajib berhati-hati pada menjalankan tugasnya. Tingkatkan terus profesionalisme. Jaga sopan santun Anda, jangan memberikan kesombongan. Polisi bertugas melayani, mengayomi, mengayomi rakyat, dan menegakkan hukum, dalam rangka mewujudkan harkamtibmas.

Di era terbaru ini, orang dengan perangkat pintarnya bisa merekam dan menjadi viral, menyampaikan ke media, atau membentuk pernyataan pada media umum. Bila terjadi pelanggaran, maka yang dipertaruhkan artinya nama baik institusi. seperti keluarnya bentuk kritik rakyat terhadap kinerja polisi yang viral di media sosial mirip Twitter dengan memakai tagar #percumalaporpolisi. Hal ini menjadi bentuk kepedulian dan masukan rakyat untuk menaikkan kinerja Korps Bhayangkara. Diketahui, dalam dua pekan terakhir, ada kecaman besar -besaran terhadap kinerja polisi. misalnya, keluarnya tagar #percumalaporpolisi, terkait penghentian penyidikan dugaan pencabulan seseorang ayah terhadap ketiga anaknya, pada Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan yang akan terjadi survei yang dilakukan oleh forum Survei Indonesia (LSI), memberikan bahwa masyarakat Indonesia sangat tidak puas menggunakan penegakan hukum di negara ini. dalam survei yang menilai mereka tidak puas menggunakan penegakan hukum di Indonesia, cakupannya merata pada semua lapisan rakyat. Temuan ini mendeskripsikan rendahnya wibawa hukum di mata rakyat. Kekecewaan warga terhadap penegakan hukum dalam membangun rasa safety di warga artinya buah asal penerapan sistem sekuler. Sistem sekuler memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan oleh insan yang rentan terhadap kepentingan dan mudah dimanipulasi. Akibatnya, aturan tak menjadi indera untuk mencari kebenaran dan keadilan untuk melegitimasi kebenaran atau keadilan buat kekuasaan. Sementara, ini tidak sama karena Jika aturan tak lagi dianggap, orang akan menemukan jalan mereka sendiri buat menemukan jalan menuju keadilan. masyarakat pada akhirnya akan bertindak mengambil aturan sendiri dampak runtuhnya penegakan aturan hingga keadilan tanggal landas. Sistem demokrasi sekuler yang membuat ketidakadilan sistematis.

Tagar #percumalaporpolisi telah di-tweet lebih berasal 16.000 kali di Twitter Indonesia. Sebagian besar tweet berisi kritik serta kritik terhadap polisi sebab tak mampu menyidik masalah pelecehan seksual tiga anak pada Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Polisi ialah aparat

penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan mengayomi rakyat. pada menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dituntut buat bisa mengayomi serta menyampaikan rasa kemanan pada rakyat. Rakyat yang merasa menjadi korban tindak pidana berhak melapor ke polisi setempat dan pelaku tindak pidana tadi akan digeledah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang angka 2 Tahun 2002 wacana Kepolisian Negara Republik Indonesia "bahwa pemeliharaan keamanan pada negeri melalui upaya menyelenggarakan fungsi kepolisian yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban rakyat, penegakan aturan, proteksi, pengayoman, serta pengabdian pada warga adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang dibantu warga menggunakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetapi teori ini berbeda dengan praktek yang terjadi pada lapangan yang tak jarang menyimpang asal fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. aturan serta tribrata, yang menghormati pedoman dasar dan moral kepolisian.

## SIMPULAN

Media sosial sangat penting sebagai komunikasi tentang setiap insiden, termasuk bentuk penolakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan buat mengeksplorasi pesan dan reaksi yang timbul pada platform media umum Twitter. Pengguna internet sekarang bebas menyebarkan informasi hingga membuat opini publik yang mempunyai berbagai arti. Opini ini diyakini sebagai data yang akurat sebab opini publik terbentuk asal luapan emosi, opini yang ada, atau cerita yang viral di media umum. Seperti halnya di Twitter yang digunakan untuk memperbarui tweet, membalas tweet, dan menyebut seorang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi pengguna internet. Tagar #percumalaporpolisi sudah pada-tweet lebih berasal 16.000 kali di Twitter Indonesia. Sebagian kabar tweet berisi pesan dan kritik terhadap polisi karena tidak bisa menyidik masalah pemerkosaan tiga anak pada Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Tagar #percumalaporpolisi ialah bentuk kritik masyarakat sebagai bentuk penilaian publik terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) buat melakukan perbaikan pada sistem yang telah mengakar. Tagar tersebut jua adalah bentuk spontanitas masyarakat dalam berkomunikasi melalui kritik dan kontrol sosial terhadap polisi. sebagai akibatnya pelayanan publik yang baik harus dilakukan sang kepolisian melalui penegakan aturan yang baik pula. Melalui tagar #percumalaporpolisi, Sentimen negatif rakyat terhadap

Polri semakin bertenaga. Sentimen negatif ini bisa diartikan sebagai bentuk resistensi sipil yang tidak dapat dibendung oleh masyarakat, menggunakan total sentimen negatif sebesar 86%. Tagar #percumalaporpolisi dilengkapi dengan cerita rakyat yang kecewa menggunakan polisi. Melalui analisis kata yang paling acapkali muncul, peneliti mengambil 20 istilah yang paling acapkali digunakan dalam #percumalaporpolisi. Konten tersebut berisi bentuk kritik warga yang kerap membentuk warga murka atas kasus yang belum selesai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, N. P. (2018). Uncivil Disobedience: Political Commitment and Violence. *Res Publica*, 24(4), 475–491. <https://doi.org/10.1007/s11158-017-9367-0>
- Adorjan, M., Khiatani, P. V., & Chui, W. H. (2021). The rise and ongoing legacy of localism as collective identity in Hong Kong: Resinicisation anxieties and punishment of political dissent in the post-colonial era. *Punishment and Society*. <https://doi.org/10.1177/14624745211040308>
- Bakratcheva, A. (2019). "men first, subjects afterward" thoreau, "civil disobedience," and the thoreauvian echoes of 1968 and after. *Review of International American Studies*, 12(2), 119–128. <https://doi.org/10.31261/RIAS.7375>
- Bereményi, B. Á., & Muriel, I. S. (2019). Mortgage crisis: Social impacts and responses in Catalonia. *Arbor*, 195(793). <https://doi.org/10.3989/arbor.2019.793n3001>
- Celikates, R. (2019). Constituent power beyond exceptionalism: Irregular migration, disobedience, and (re-)constitution. *Journal of International Political Theory*, 15(1), 67–81. <https://doi.org/10.1177/1755088218808311>
- Delmas, C. (2018). Is hacktivism the new civil disobedience? *Raisons Politiques*, 69(1), 63–81. <https://doi.org/10.3917/rai.069.0063>
- Durston, J. W., Gaete, J. M., & Pérez, M. (2016). Community, connectivity and the regional movement in Patagonia: The evolution of social capital in the aysén region of Chile. *Cepal Review*, 2016(118), 221–234. <https://doi.org/10.18356/CDCF3B02-EN>
- Efendi, D., & Haryadi, H. (2016). Masyarakat Sipil Malaysia: Momentum Dan Kemunculannya. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 71–86. <https://doi.org/10.30631/tjd.v15i1.32>
- Fitz-Henry, E. (2018). Challenging Corporate "Personhood": Energy Companies and the "Rights" of Non-Humans. *Political and Legal Anthropology Review*, 41, 85–102. <https://doi.org/10.1111/plar.12255>

- Franco, A. C. (2019). Henry David Thoreau and the modern libertarian tradition . *Anglo Saxonica*, 17(1). <https://doi.org/10.5334/AS.27>
- Fronek, P., & Chester, P. (2016). Moral outrage: Social workers in the third space. *Ethics and Social Welfare*, 10(2), 163–176. <https://doi.org/10.1080/17496535.2016.1151908>
- Hanna, P., Langdon, E. J., & Vanclay, F. (2016). Indigenous rights, performativity and protest. *Land Use Policy*, 50, 490–506. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.034>
- Hashizume, M. H. (2017). Political and epistemological disobedience of indigenous movements in Brazil and Bolivia as counter -hegemonic learning . *Revista Critica de Ciencias Sociais*, 114, 207–230. <https://doi.org/10.4000/rccs.6835>
- Hess, D. J., & Satcher, L. A. (2019). Conditions for successful environmental justice mobilizations: an analysis of 50 cases. *Environmental Politics*, 28(4), 663–684. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1565679>
- Hundman, E., & Parkinson, S. E. (2019). Rogues, degenerates, and heroes: Disobedience as politics in military organizations. *European Journal of International Relations*, 25(3), 645–671. <https://doi.org/10.1177/1354066118823891>
- Iwuoha, V. C., & Aniche, E. T. (2021). Protests and blood on the streets: repressive state, police brutality and #EndSARS protest in Nigeria. *Security Journal*. <https://doi.org/10.1057/s41284-021-00316-z>
- Jubb, R. (2019). Disaggregating Political Authority: What's Wrong with Rawlsian Civil Disobedience? *Political Studies*, 67(4), 955–971. <https://doi.org/10.1177/0032321718816208>
- Lawson, S. (2017). Access, ethics and piracy. *Insights: The UKSG Journal*, 30(1), 25–30. <https://doi.org/10.1629/uksg.333>
- Lundberg, E. (2021). Guardians of Democracy? On the Response of Civil Society Organisations to Right-Wing Extremism. *Scandinavian Political Studies*, 44(2), 170–194. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12193>
- Lutskyi, A. I., Lutskyi, M. I., & Kindyuk, B. V. (2019). The contributions of prof. M.n. gernet to the development of legal science. *Russian journal of criminology*, 13(3), 519–529. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13\(3\).519-529](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(3).519-529)
- Martinez, A., & Garcia, N. M. (2018). #HuelgaUPR: The Kidnapping of the University of Puerto Rico, Students Activism, and the Era of Trump. *Frontiers in Education*, 3. <https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00084>
- Neumayer, C., & Svensson, J. (2016). Activism and radical politics in the digital age: Towards

- a typology. *Convergence*, 22(2), 131–146. <https://doi.org/10.1177/1354856514553395>
- Newman, S. (2019). La Boétie and republican liberty: Voluntary servitude and non-domination. *European Journal of Political Theory*. <https://doi.org/10.1177/1474885119863141>
- Niesen, P. (2019). Introduction: Resistance, disobedience or constituent power? Emerging narratives of transnational protest. *Journal of International Political Theory*, 15(1), 2–10. <https://doi.org/10.1177/1755088218808065>
- Nurrahmi, F., & Syam, H. M. (2020). Perilaku Informasi Mahasiswa dan Hoaks di Media Sosial. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 129–146. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.9215>
- Penders, B., & Shaw, D. M. (2020). Civil disobedience in scientific authorship: Resistance and insubordination in science. *Accountability in Research*, 27(6), 347–371. <https://doi.org/10.1080/08989621.2020.1756787>
- Prior, J., & Crofts, P. (2016). Shooting up illicit drugs with God and the State: the legal–spatial constitution of Sydney’s Medically Supervised Injecting Centre as a sanctuary. *Geographical Research*, 54(3), 313–323. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12171>
- Rimmer, M. (2017). Stand with Jono: Culture-jamming, civil disobedience and corporate regulation in an age of climate change. In *Law as if Earth Really Mattered: The Wild Law Judgment Project* (pp. 293–323). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315618319>
- Román, C. A. (2021). Detention centers: Racism and migrant struggle in the united states . *Andamios*, 18(45), 121–146. <https://doi.org/10.29092/uacm.v18i45.813>
- Rosanti, D., Bela, S., Nurmandi, A., & Muallidin, I. (2021). *Effectiveness of Disaster Mitigation Information* (Vol. 1). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6>
- Schradie, J. (2018). Moral Monday Is More Than a Hashtag: The Strong Ties of Social Movement Emergence in the Digital Era. *Social Media and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2056305117750719>
- Suswanta, Danang Kurniawan, Achmad Nurmandi, S. (2021). *Jurnal Studi Sosial dan Politik Published by FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*. 1–8.
- Terzis, G. (2016). The end of hypocrisy: Online activism and ethno-political conflicts. *Pacific Journalism Review*, 22(1), 105–120. <https://doi.org/10.24135/pjr.v22i1.15>
- Vandepitte, E., Vandermoere, F., & Hustinx, L. (2019). Civil Anarchizing for the Common

- Good: Culturally Patterned Politics of Legitimacy in the Climate Justice Movement. *Voluntas*, 30(2), 327–341. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-00073-5>
- Vandevoordt, R. (2019). Subversive humanitarianism: Rethinking refugee solidarity through grass-roots initiatives. *Refugee Survey Quarterly*, 38(3), 245–265. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdz008>
- Yamin, A. E. (2019). Struggles for human rights in health in an age of neoliberalism: From civil disobedience to epistemic disobedience. *Journal of Human Rights Practice*, 11(2), 357–372. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huz026>
- Adams, N. P. (2018). Uncivil Disobedience: Political Commitment and Violence. *Res Publica*, 24(4), 475–491. <https://doi.org/10.1007/s11158-017-9367-0>
- Adorjan, M., Khiatani, P. V., & Chui, W. H. (2021). The rise and ongoing legacy of localism as collective identity in Hong Kong: Resinicisation anxieties and punishment of political dissent in the post-colonial era. *Punishment and Society*. <https://doi.org/10.1177/14624745211040308>
- Bakratcheva, A. (2019). “men first, subjects afterward” thoreau, “civil disobedience,” and the thoreauvian echoes of 1968 and after. *Review of International American Studies*, 12(2), 119–128. <https://doi.org/10.31261/RIAS.7375>
- Bereményi, B. Á., & Muriel, I. S. (2019). Mortgage crisis: Social impacts and responses in Catalonia. *Arbor*, 195(793). <https://doi.org/10.3989/arbor.2019.793n3001>
- Celikates, R. (2019). Constituent power beyond exceptionalism: Irregular migration, disobedience, and (re-)constitution. *Journal of International Political Theory*, 15(1), 67–81. <https://doi.org/10.1177/1755088218808311>
- Delmas, C. (2018). Is hacktivism the new civil disobedience? *Raisons Politiques*, 69(1), 63–81. <https://doi.org/10.3917/rai.069.0063>
- Durston, J. W., Gaete, J. M., & Pérez, M. (2016). Community, connectivity and the regional movement in Patagonia: The evolution of social capital in the aysén region of Chile. *Cepal Review*, 2016(118), 221–234. <https://doi.org/10.18356/CD3B02-EN>
- Efendi, D., & Haryadi, H. (2016). Masyarakat Sipil Malaysia: Momentum Dan Kemunculannya. *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 71–86. <https://doi.org/10.30631/tjd.v15i1.32>
- Fitz-Henry, E. (2018). Challenging Corporate “Personhood”: Energy Companies and the “Rights” of Non-Humans. *Political and Legal Anthropology Review*, 41, 85–102. <https://doi.org/10.1111/plar.12255>
- Franco, A. C. (2019). Henry David Thoreau and the modern libertarian tradition. *Anglo*

- Saxonica*, 17(1). <https://doi.org/10.5334/AS.27>
- Fronek, P., & Chester, P. (2016). Moral outrage: Social workers in the third space. *Ethics and Social Welfare*, 10(2), 163–176. <https://doi.org/10.1080/17496535.2016.1151908>
- Hanna, P., Langdon, E. J., & Vanclay, F. (2016). Indigenous rights, performativity and protest. *Land Use Policy*, 50, 490–506. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.034>
- Hashizume, M. H. (2017). Political and epistemological disobedience of indigenous movements in Brazil and Bolivia as counter-hegemonic learning. *Revista Critica de Ciencias Sociais*, 114, 207–230. <https://doi.org/10.4000/rccs.6835>
- Hess, D. J., & Satcher, L. A. (2019). Conditions for successful environmental justice mobilizations: an analysis of 50 cases. *Environmental Politics*, 28(4), 663–684. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1565679>
- Hundman, E., & Parkinson, S. E. (2019). Rogues, degenerates, and heroes: Disobedience as politics in military organizations. *European Journal of International Relations*, 25(3), 645–671. <https://doi.org/10.1177/1354066118823891>
- Iwuoha, V. C., & Aniche, E. T. (2021). Protests and blood on the streets: repressive state, police brutality and #EndSARS protest in Nigeria. *Security Journal*. <https://doi.org/10.1057/s41284-021-00316-z>
- Jubb, R. (2019). Disaggregating Political Authority: What's Wrong with Rawlsian Civil Disobedience? *Political Studies*, 67(4), 955–971. <https://doi.org/10.1177/0032321718816208>
- Lawson, S. (2017). Access, ethics and piracy. *Insights: The UKSG Journal*, 30(1), 25–30. <https://doi.org/10.1629/uksg.333>
- Lundberg, E. (2021). Guardians of Democracy? On the Response of Civil Society Organisations to Right-Wing Extremism. *Scandinavian Political Studies*, 44(2), 170–194. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12193>
- Lutskyi, A. I., Lutskyi, M. I., & Kindyuk, B. V. (2019). The contributions of prof. M.n. gernet to the development of legal science. *Russian journal of criminology*, 13(3), 519–529. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13\(3\).519-529](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(3).519-529)
- Martinez, A., & Garcia, N. M. (2018). #HuelgaUPR: The Kidnapping of the University of Puerto Rico, Students Activism, and the Era of Trump. *Frontiers in Education*, 3. <https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00084>
- Neumayer, C., & Svensson, J. (2016). Activism and radical politics in the digital age: Towards a typology. *Convergence*, 22(2), 131–146. <https://doi.org/10.1177/1354856514553395>

- Newman, S. (2019). La Boétie and republican liberty: Voluntary servitude and non-domination. *European Journal of Political Theory*.  
<https://doi.org/10.1177/1474885119863141>
- Niesen, P. (2019). Introduction: Resistance, disobedience or constituent power? Emerging narratives of transnational protest. *Journal of International Political Theory*, 15(1), 2–10.  
<https://doi.org/10.1177/1755088218808065>
- Nurrahmi, F., & Syam, H. M. (2020). Perilaku Informasi Mahasiswa dan Hoaks di Media Sosial. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 129–146.  
<https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.9215>
- Penders, B., & Shaw, D. M. (2020). Civil disobedience in scientific authorship: Resistance and insubordination in science. *Accountability in Research*, 27(6), 347–371.  
<https://doi.org/10.1080/08989621.2020.1756787>
- Prior, J., & Crofts, P. (2016). Shooting up illicit drugs with God and the State: the legal–spatial constitution of Sydney’s Medically Supervised Injecting Centre as a sanctuary. *Geographical Research*, 54(3), 313–323. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12171>
- Rimmer, M. (2017). Stand with Jono: Culture-jamming, civil disobedience and corporate regulation in an age of climate change. In *Law as if Earth Really Mattered: The Wild Law Judgment Project* (pp. 293–323). Taylor and Francis.  
<https://doi.org/10.4324/9781315618319>
- Román, C. A. (2021). Detention centers: Racism and migrant struggle in the united states . *Andamios*, 18(45), 121–146. <https://doi.org/10.29092/uacm.v18i45.813>
- Rosanti, D., Bela, S., Nurmandi, A., & Muallidin, I. (2021). *Effectiveness of Disaster Mitigation Information* (Vol. 1). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6>
- Schradie, J. (2018). Moral Monday Is More Than a Hashtag: The Strong Ties of Social Movement Emergence in the Digital Era. *Social Media and Society*, 4(1).  
<https://doi.org/10.1177/2056305117750719>
- Suswanta, Danang Kurniawan, Achmad Nurmandi, S. (2021). *Jurnal Studi Sosial dan Politik Published by FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*. 1–8.
- Terzis, G. (2016). The end of hypocrisy: Online activism and ethno-political conflicts. *Pacific Journalism Review*, 22(1), 105–120. <https://doi.org/10.24135/pjr.v22i1.15>
- Vandepitte, E., Vandermoere, F., & Hustinx, L. (2019). Civil Anarchizing for the Common Good: Culturally Patterned Politics of Legitimacy in the Climate Justice Movement.

*Voluntas*, 30(2), 327–341. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-00073-5>

Vandevoordt, R. (2019). Subversive humanitarianism: Rethinking refugee solidarity through grass-roots initiatives. *Refugee Survey Quarterly*, 38(3), 245–265. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdz008>

Yamin, A. E. (2019). Struggles for human rights in health in an age of neoliberalism: From civil disobedience to epistemic disobedience. *Journal of Human Rights Practice*, 11(2), 357–372. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huz026>